

KRISIS ARAB-ISRAEL DAN USAHA PERDAMAIAN ARAB

O. ABDUL RACHMAN*

Krisis Arab-Israel bermula dengan pembentukan negara Israel di wilayah Palestina yang sudah berpenduduk bangsa Palestina-Arab. Krisis ini mulai pada tahun 1947 dan tidak berkesudahan sampai sekarang.

Dalam waktu tiga puluh lima tahun peperangan meletus sampai empat kali. Tiap kali peperangan dihentikan dengan gencatan senjata yang diprakarsai oleh pihak ketiga, yaitu PBB. Tidak pernah berakhir dengan kemenangan satu pihak dan kekalahan pihak lain.

Skenario yang berlaku di pentas Timur Tengah memperlihatkan Israel di satu pihak, yang bersatu dan terdorong untuk mempertahankan hak hidupnya sebagai bangsa dan negara, dibantu oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Di pihak lain tampak negara-negara Arab yang memperlihatkan kondisi lemah karena tidak sempat menyusun front persatuan dan kesatuan karena antara pemimpin-pemimpin Arab terdapat rasa curiga mencurigai. Peperpecahan di kalangan Arab itu terjadi baik di waktu berlangsungnya perang maupun dalam usaha perdamaian Arab untuk menyelesaikan situasi krisis yang tidak berkesudahan itu.

SOLIDARITAS ARAB DI WAKTU PERANG

Pada tahun 1947-1948 terjadi perang Arab-Israel yang pertama. Pembentukan negara Israel dilakukan dalam wilayah yang sudah berpenghuni Arab. Akibat kedatangan orang-orang Yahudi bersama organ-organ teror dan satuan-satuan tentara sebagian bangsa Arab terdesak dan bahkan terusir dari kampung halaman mereka.

*Staf CSIS.

Di luar wilayah Palestina pasukan gabungan dari lima negara Arab bertekad untuk menghancurkan negara Israel. Akan tetapi tentara gabungan Arab itu terpecah karena kurang persiapan dan karena pertentangan-pertentangan di kalangan markas besarnya. Hanya Legiun Arab dari kerajaan Transyordania segera menyeberangi Sungai Yordan dan menduduki Tepi Barat Sungai Yordan serta kota Yerusalem bagian timur.

Ketika perang yang pertama itu berakhir, negara Israel telah berdiri tegak dan diakui oleh negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Negara Yahudi ini terletak di tengah-tengah negara-negara Arab yang rakyatnya berperasaan anti Israel. Semangat rakyat banyak di negara-negara Arab itu menonjolkan solidaritas, akan tetapi sayang pemimpin-pemimpin mereka tidak dapat mengandalkannya. Di beberapa negara Arab perwira-perwira muda yang kecewa karena kalah perang bangkit dan berhasil menggulingkan pemerintah-pemerintah kerajaan yang dianggap bertanggung jawab atas kekalahan itu.

Di Mesir sejumlah perwira muda berhasil menggulingkan pemerintah kerajaan pada tahun 1952. Ke dalam oleh pimpinan baru itu diambil tindakan-tindakan anti-korupsi dan disusun rencana untuk memperbaiki nasib rakyat banyak. Keluar, Nasser mengambil kebijaksanaan anti penjajah yaitu Inggris dengan memfokuskan perhatian bangsa pada Terusan Suez yang merupakan lambang kekuasaan Inggris dan Perancis. Politik anti penjajah dan anti Inggris itu disambut hangat bukan saja oleh rakyat Mesir tetapi juga oleh rakyat banyak di lain-lain negara Arab.

Pada tahun 1956 terjadi perang Arab-Israel yang kedua. Pasukan-pasukan Inggris, Perancis dan Israel menyerbu ke jurusan Terusan Suez untuk menguasainya kembali. Sangat menarik perhatian bahwa perang kedua ini dihentikan berkat kerja sama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di bawah tekanan mereka dan PBB, pasukan-pasukan Inggris, Perancis dan Israel di tarik mundur ke pangkalan mereka masing-masing. Sesudah itu pemerintah Mesir dapat melanjutkan konsolidasinya untuk membangun negaranya. Dengan bantuan blok Timur, terutama Uni Soviet dan Cekoslowakia, Mesir mendapatkan persenjataan mutakhir. Dengan bantuan Uni Soviet pula dibangun Bendungan Aswan yang bermanfaat bagi pelaksanaan rencana pertanian.

Program pembangunan Mesir ini disebut Sosialisme Arab yang membangkitkan hati nurani golongan-golongan di negara-negara Arab lainnya. Akan tetapi di Mesir sendiri pelaksanaan sosialisme Arab itu belum jelas bentuk dan arahnya. Dalam periode ini Nasser terlibat dalam perang di Yaman Selatan melawan Yaman Utara yang didukung Arab Saudi. Salah satu

peristiwa pertikaian antar Arab yang melemahkan solidaritas dan perjuangan Arab.

Pada tahun 1967 terjadi perang Arab-Israel yang ketiga. Pada Pertemuan Puncak Arab enam bulan sebelumnya (1966) waktu Nasser ingin membicarakan koordinasi Arab untuk menghadapi Israel, konperensi dibubarkan tanpa menghasilkan sesuatu. Perang ketiga ini merupakan debakel besar bagi negara-negara Arab. Di antara mereka tidak terdapat koordinasi sama sekali. Tentara Israel menyerbu Sinai sampai pada Terusan Suez. Demikianpun Israel menyerbu Yordania dan berhasil menguasai sektor Arab kota Yerusalem dan Tepi Barat Sungai Yordan. Dalam perang itu Suriah kehilangan ketinggian Golan.

Ada dua masalah yang timbul sebagai akibat kekalahan Arab itu. Pertama, gejala negara-negara Arab untuk meningkatkan posisi anti-Amerika, sedangkan pihak Amerika juga menjalankan politik yang mandiri, tanpa konsultasi dengan Uni Soviet. Kedua, sebagai akibat kekalahan militer negara-negara Arab, pejoang-pejoang Palestina yang tergabung dalam bermacam-macam organisasi mulai mengadakan perenungan kembali. Mereka bertanya apakah perjuangan kemerdekaan Palestina digantungkan pada negara-negara Arab saja, atau perlukah disusun program perjuangan yang akan dilakukan oleh bangsa Palestina sendiri.

Sejak akhir 1967 terdapat pimpinan baru dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sebuah organisasi yang merupakan gabungan sebelas badan perjuangan yang terdiri dari unsur-unsur konservatif seperti Al Fatah dan unsur-unsur kiri seperti Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) dan sebagainya. Sejak itu pula PLO melancarkan operasi-operasi gerilya dan teror yang menarik perhatian dunia luas dan perhatian rakyat banyak di negara-negara Arab yang menjadi sadar bahwa perjuangan melawan Israel masih berlangsung terus.

Di bidang usaha perdamaian terdapat dua usaha, yaitu Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB (1967) dan rencana perdamaian yang diprakarsai Menlu Amerika Serikat William Rogers. Kedua usaha ini mencakup pemikiran yang sama. Berdasarkan kesadaran pemerintah-pemerintah Arab bahwa Israel tidak dapat dikalahkan melalui perjuangan bersenjata, maka pihak Arab bersedia untuk mengakui Israel dalam tapal-tapal batas yang berlaku sebelum terjadi perang tahun 1967. Akan tetapi Israel dalam suasana menang perang tidak bersedia untuk menarik pasukan-pasukannya ke belakang perbatasan pra-perang. Dengan alasan security, Israel menuntut supaya perbatasannya ditinjau kembali dengan menambah wilayahnya dengan bagian-bagian tertentu wilayah Arab. Sikap Israel itu tidak dapat diterima oleh negara-negara Arab yang sebenarnya sudah melepaskan tuntutan semula

mereka agar Israel dihapuskan saja. Dengan demikian kedua usaha perdamaian itu gagal mencapai sasarannya.

Selanjutnya pimpinan baru PLO mengumumkan kebijaksanaan baru. PLO akan memperjuangkan negara Palestina yang non-Zion, sekuler dan demokratis di mana orang-orang Yahudi dan Arab akan mempunyai persamaan hak dan kewajiban. Rumusan ini dipertahankan pada Kongres PLO yang keempat tahun 1968 dan pada kongres-kongres berikutnya, seperti pada kongres PLO yang keduabelas tahun 1974.

Akan tetapi milintasi pejuang-pejuang PLO itu juga mengakibatkan pertentangan dengan Pemerintah Yordania dan kemudian dengan Pemerintah Libanon. Terjadi pertempuran-pertempuran sengit di Yordania yang memaksa PLO untuk pindah ke Libanon. Akan tetapi di sinipun terjadi pertarungan senjata dengan pejoang-pejoang Kristen yang konservatif.

PERGANTIAN PIMPINAN

Meninggalnya Nasser pada tahun 1970 membawa perubahan besar dalam perkembangan krisis Arab-Israel. Sebelumnya Nasser berwibawa di Dunia Arab sebagai pemimpin Arab. Arab Saudi berusaha untuk mengisi kevakuman yang terjadi akibat kejadian itu. Di satu pihak Arab Saudi mengandalkan hubungan baiknya dengan Amerika Serikat untuk membuatnya lebih mengerti aspirasi Arab, dan di lain pihak ia berusaha untuk menenteramkan negara-negara Arab yang radikal.

Kebetulan juga bahwa pimpinan di Mesir berpindah tangan ke Anwar Sadat yang dipandang lebih moderat dari pada Nasser. Lebih lagi pada tahun 1971 Anwar Sadat menangkap Wakil Presiden Ali Sabry yang terlalu pro Moskwa. Sebagai akibatnya hubungan antara Mesir dan Uni Soviet makin memburuk. Pada tahun 1972 penasihat-penasihat dan teknisi Soviet diusir dari Mesir.

Begitu juga di Suriah, Presiden Salah Jadid yang terlalu kiri digulingkan oleh Hafiz Asad yang waktu itu lebih moderat. Kerja sama antara Arab Saudi, Mesir dan Suriah dikembangkan untuk menarik simpati rakyat banyak Arab dengan mengusahakan agar Israel menarik pasukannya. Asumsi ini diajukan oleh Arab Saudi karena hubungan baiknya dengan Amerika Serikat. Akan tetapi usaha Arab Saudi itu tidak mendapat tanggapan dari Amerika Serikat. Sementara itu baik Mesir maupun Suriah berusaha untuk memperkuat angkatan perangnya. Pada tahun 1971 Mesir menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama dengan Uni Soviet.

Dengan Suriah Mesir mendirikan Komando Gabungan yang merupakan contoh pertama solidaritas Arab di bidang militer, ekonomi dan politik.

Pada bulan Oktober 1973 terjadi perang Arab-Israel yang keempat. Dengan kejutan strategis tentara Mesir menyeberangi Terusan Suez dan berhasil maju di Sinai. Demikian pun Suriah berhasil mencapai kemajuan-kemajuan. Akan tetapi dalam serangan balasan tentara Israel berhasil memukul mundur tentara Suriah dan kemudian mengepung tentara Mesir di Sinai. Israel bahkan berhasil mengadakan serangan ke arah kota-kota Mesir dan Damaskus.

Perang Oktober itu dihentikan dengan Resolusi Dewan Keamanan No. 338, yang memerintahkan penghentian tembak menembak dan menyerukan kepada semua pihak yang bersangkutan agar sesuai gencatan senjata itu mulai dilaksanakan Resolusi Dewan Keamanan No. 242 lengkap dengan semua bagiannya.

Perang Oktober 1973 yang sebenarnya merupakan perang dua negara Arab, yaitu Mesir dan Suriah, mendapat dukungan di bidang ekonomi maupun politik dari negara-negara Arab lainnya. Negara-negara pengeksport minyak Arab mengenakan embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan negara-negara yang mendukung Israel dan melipatgandakan harga minyak. Minyak ternyata senjata ekonomi yang ampuh. Di bidang politik diplomat-diplomat Arab mengadakan lobbying di negara-negara sahabat mereka untuk menarik simpati negara-negara lain pada perjuangan Arab.

Lebih dari itu, dalam perang Oktober waktu Israel memerlukan persenjataan baru untuk menggantikan senjata-senjata yang hancur karena perang, negara-negara Eropa Barat melarang pengangkutan senjata melalui daratan Eropa. Pesawat-pesawat Amerika Serikat terpaksa menggunakan kepulauan Azores untuk mengisi bahan bakar.

USAHA PERDAMAIAN SETELAH 1973

Situasi strategis setelah 1973 berlainan sekali dengan situasi sebelumnya. Di pihak Arab tampak semangat menang karena senjata ekonomi berupa minyak terbukti ampuh sekali. Di bidang politik rakyat banyak di negara-negara Arab memang selalu bersatu dalam semangat anti-Israel. Pemerintah-pemerintah Arab sekarang juga merasa bersatu. Situasi ini sangat menguntungkan PLO. Pada Konferensi Puncak Arab di Rabbat 1974, PLO diakui oleh semua pemerintah Arab sebagai satu-satunya wakil bangsa Palestina. Setahun kemudian Majelis Umum PBB juga ikut mengakui PLO sebagai wakil tunggal bangsa Palestina.

Sebaliknya bangsa Israel, walaupun berhasil dalam serangan balasan militernya, merasa lebih terancam kelangsungan hidupnya karena dikepung oleh negara-negara Arab yang merasa menang itu.

Dalam iklim strategis serupa itu, Menlu Amerika Serikat Kissinger mulai mengadakan diplomasi bolak-baliknya. Dia berusaha memperoleh legitimasi Israel dari negara-negara Arab sambil menjanjikan bantuan ekonomi dan lain-lain kepada negara-negara Arab yang membutuhkannya. Lebih keras lagi ia berusaha untuk menarik sebanyak mungkin negara Arab menjadi sahabat Amerika. Di Mesir tugasnya ringan karena Anwar Sadat memang sudah berniat untuk mengurangi, kalau perlu bahkan menghentikan, hubungan Mesir dengan Uni Soviet. Peranan Arab Saudi sudah jelas karena sejak meninggalnya Nasser negara itu berusaha meyakinkan Amerika Serikat untuk menekan Israel agar memperlunak sikapnya.

Akan tetapi tugas diplomasinya di Israel berat karena menghadapi sikap keras. Lagi dengan alasan security, Israel berkeberatan untuk menarik pasukannya ke perbatasan yang berlaku sebelum perang 1967. Demikian pun Israel bersikeras terhadap PLO yang dianggapnya sebagai organisasi teror, padahal bangsa Palestina yang tinggal di daerah-daerah yang didudukinya telah mengakui PLO sebagai wakil mereka.

Dalam pada itu di Mesir Anwar Sadat menghadapi situasi ekonomi yang memburuk, sedangkan di bidang politik terdapat golongan-golongan yang tidak menyetujui kebijaksanaannya yang menyimpang dari arah politik mending Nasser. Dalam keadaan semacam itu makin terasa oleh Anwar Sadat bahwa Mesir harus mencari perdamaian dengan Israel agar dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dalam negerinya.

Maka pada tahun 1977 Anwar Sadat pergi ke Israel untuk menawarkan kesediaan Mesir untuk berdamai dengan Israel. Tindakan berani Anwar Sadat itu disambut dengan hangat oleh Amerika Serikat dan Israel. Pada tahun 1978 diadakan pembicaraan di Camp David antara Mesir dan Israel di bawah naungan Presiden Amerika Serikat Carter. Pada tahun 1979 ditandatangani Perjanjian Perdamaian antara Mesir dan Israel.

Usaha perdamaian Mesir yang bertindak sendiri itu ditentang keras oleh negara-negara Arab lain. Setelah perjanjian perdamaian tersebut ditandatangani, hampir semua negara Arab memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir dan Arab Saudi juga menghentikan bantuan keuangan yang diberikannya setiap tahun sejak akhir perang 1967. Negara-negara Arab mengambil sikap keras itu karena berpendapat bahwa perjanjian perdamaian itu tidak merupakan suatu penyelesaian yang menyeluruh dan hanya menguntungkan Israel.

Pada tahun 1979 di samping perjanjian perdamaian Mesir-Israel itu terdapat dua perkembangan strategis lain. Yang pertama adalah revolusi Islam di Iran yang berhasil menggulingkan Shah Pahlevi, seorang sekutu Amerika Serikat yang sejati. Kemudian mahasiswa-mahasiswa Iran menyerbu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, ibukota Iran, dan menyandera para diplomat Amerika beserta stafnya. Kedua, sebanyak delapan puluh ribu pasukan Soviet menyerbu Afghanistan baik dengan operasi lintas darat maupun lintas udara. Pemerintah Hafiz Amin digulingkan dan diganti oleh Babrak Karmal yang lebih dipercaya oleh Uni Soviet.

Perkembangan di Iran itu telah membuat pemerintah-pemerintah Arab yang konservatif sangat prihatin karena mula-mula ternyata berhasil menghimpun kekuatan revolusioner untuk menggulingkan Shah Iran. Hal itu merupakan sebab utama terbentuknya Dewan Kerja Sama Teluk yang terdiri dari Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar dan Uni Emirat Arab. Di samping itu tampak juga usaha kerja sama antara Irak dan Arab Saudi, yang tadinya merupakan antagonis-antagonis karena corak sosialis Irak.

Pecahnya perang antara Irak dan Iran pada bulan September 1980 juga harus dilihat dalam rangka bahaya geo-strategis dari Iran.

Selanjutnya penyerbuan Soviet ke Afganistan dilihat oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat lain sebagai gejala ekspansi Soviet ke kawasan Teluk Parsi yang kaya akan minyak, padahal negara-negara industri Barat dan Jepang tergantung pada minyak itu. Pada bulan Januari 1980 Presiden Carter mengecam tindakan Soviet itu dan mengancam bahwa Amerika Serikat akan bertindak keras-kalau perlu dengan angkatan perang-terhadap pihak ketiga yang berusaha menguasai kawasan Teluk. Ia mengutamakan ancaman Soviet dalam menyusun kebijakan politik luar negerinya. Demikian pun Presiden Reagan yang menggantikannya.

Menteri Luar Negeri Haig mengadakan kunjungan ke Timur Tengah pada permulaan tahun 1981 untuk menghimpun potensinya ke dalam konsensus strategis bahwa bahaya utama adalah gejala ekspansi Uni Soviet. Akan tetapi usahanya itu kurang berhasil. Pada umumnya pemerintah-pemerintah Arab ternyata tetap berpegang pada pendirian semula mereka bahwa Israellaah musuh utama mereka. Invasi Soviet tersebut memang dibicarakan dalam Konperensi Islam di Islamabad, di Mekkah dan di Taif, akan tetapi fokus pembicaraan adalah Israel. Masalah Afghanistan hanya disebut dalam satu dua paragraf saja.

Pelaksanaan perdamaian antara Israel dan Mesir dalam bidang pertukaran dutabesar tidak menemui kesulitan. Begitu pula pembebasan

Gurun Sinai secara bertahap oleh Israel untuk diserahkan kembali kepada Mesir.

Tetapi terdapat peristiwa-peristiwa lain yang menimbulkan keragu-raguan terhadap itikad baik Israel. Di Tepi Barat Sungai Yordan, Israel mendirikan pemukiman-pemukiman baru untuk orang-orang Yahudi. Dari ucapan-ucapan pembesar-pembesar Israel dapat ditarik kesimpulan bahwa Israel ingin menjadikan Tepi Barat Sungai Yordan bagian wilayahnya dengan menggunakan nama Yudea dan Samaria. Begitu pula kota Yerusalem dijadikan ibukota Israel dan ini berarti bahwa bagian Arabnya tidak akan dikembalikan seperti diserukan dalam Resolusi 242. Selain itu Israel menganeksasi ketinggian Golan dan pesawat-pesawat terbangnya menghancurkan instalasi nuklir Irak yang dianggap dapat membahayakan keamanan nasionalnya. Rupanya Israel merasa dirinya cukup kuat untuk bertindak semaunya dan di mana saja demi kepentingan sekuritinya tanpa mengindahkan pendapat pihak-pihak lain.

Dalam suasana tidak menentu mengenai berhasil atau tidaknya pelaksanaan perdamaian Israel-Mesir, maka pada tanggal 7 Agustus 1981, Arab Saudi menawarkan rencana perdamaian yang terdiri dari delapan pasal:

- (1) penarikan mundur Israel dari semua wilayah Arab yang didudukinya sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur;
- (2) pemindahan semua pemukiman Israel yang didirikan sejak 1967;
- (3) menjamin kebebasan melakukan ibadah dan menyelenggarakan upacara keagamaan untuk semua agama di tempat-tempat suci di Yerusalem;
- (4) penegasan kembali hak bagi orang-orang Palestina untuk kembali dan hak atas pampasan bagi mereka yang tidak mau kembali;
- (5) menempatkan wilayah Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza di bawah pengawasan PBB selama satu periode yang tidak boleh melebihi beberapa bulan;
- (6) mendirikan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibukota;
- (7) mengakui hak hidup dengan damai bagi semua negara di kawasan ini;
- (8) pelaksanaan prinsip-prinsip ini supaya dijamin oleh PBB atau beberapa negara anggotanya.

Seperti Perjanjian Camp David, begitupun Rencana Perdamaian Arab Saudi yang diumumkan oleh Pangeran Fahd itu tidak diterima oleh semua negara Arab. Dunia Arab tetap terpecah-belah. Negara-negara di sekitar Teluk Parsi, anggota Dewan Kerja Sama Negara-negara Teluk, pada umumnya menerima baik rencana Fahd itu. Begitu juga Raja Hussein dari Yordania bersedia untuk mengadakan perundingan dengan Israel berdasarkan rencana 8 pasal itu. Sebaliknya Irak, Libia dan Suriah menolak inisiatif Arab Saudi itu, se-

sedangkan Mesir mengatakan bahwa politik perdamaian melalui Camp David masih tetap berlaku.

Pada Pertemuan Puncak Arab yang diadakan di Maroko bulan Nopember 1981 rencana perdamaian Arab Saudi itu juga menjadi bahan pembicaraan. Tetapi beberapa jam setelah pembukaannya, Raja Hassan menutupnya kembali, antara lain karena terjadi perselisihan yang sengit mengenai hal itu. Alasan lain ialah bahwa banyak kepala negara tidak hadir, termasuk Presiden-presiden Suriah, Libya dan Aljazair. Bahkan Raja Khaled dari Arab Saudi tidak dapat hadir karena kesehatannya tidak mengijinkannya.

BERHASILKAH RENCANA PERDAMAIAN ARAB SAUDI?

Mengenai rencana perdamaian 8 pasal itu Pangeran Fahd mengatakan bahwa tiada unsur-unsur baru karena isinya telah tercakup dalam resolusi-resolusi dan perundingan-perundingan terdahulu.

Maka timbullah pertanyaan dapatkah rencana ini diterima oleh Israel. Sebagai reaksi pertama Israel menyatakan menolak rencana perdamaian Arab Saudi itu. Hal itu dapat diduga sebelumnya karena Israel telah melakukan beberapa tindakan, seperti menetapkan Yerusalem sebagai ibukotanya, menambah pemukiman Yahudi di tepi barat Sungai Yordan dengan alasan bahwa tepi barat itu dahulu kala adalah Yudea dan Samaria, daerah-daerah yang tidak terpisahkan dari wilayah Israel. Lebih lagi mengenai pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukota, sudah dapat dipastikan bahwa Israel tidak akan menerimanya.

Sudah dapat diperhitungkan bahwa rencana perdamaian ini akan menemui jalan buntu. Lebih lagi bila usaha Pangeran Fahd itu ditempatkan di tengah-tengah kejadian-kejadian strategis di Timur Tengah.

Dalam rangka perang Irak-Iran terdapat rasa solidaritas antara Irak dan negara-negara kerajaan Arab yang konservatif seperti Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab. Negara-negara konservatif ini mempunyai dana berlimpah yang dapat digunakan untuk membantu Irak. Akan tetapi Irak kurang mampu dalam menghadapi Iran.

Iran mendapat dukungan dari Suriah yang terlibat dalam konfrontasi dengan Yordania. Pergolakan dalam negeri seperti huru hara di kota Hama tidak meringankan beban Suriah. Tetapi yang menarik perhatian adalah bahwa Iran mampu menghimpun kekuatan tentara dan badan-badan perjuangan untuk menghadapi Irak.

Di Libanon terjadi perang dahsat antara pasukan-pasukan Kristen yang dibantu Israel di satu pihak dan pasukan-pasukan PLO, pasukan-pasukan Suriah dan pasukan-pasukan tentara Libanon di lain pihak.

Peranan PLO sebagai badan perjuangan yang mandiri makin meningkat citranya. Sikap bangsa Palestina di daerah pendudukan tergambar dalam tindakan-tindakan anti-Israel. Di Amerika telah terdengar suara-suara, misalnya dari bekas Presiden Ford dan Carter sekembali mereka dari pemakaman mendiang Sadat, bahwa Amerika Serikat sebaiknya mengajak bicara PLO. Begitu juga di Eropa Barat dan Jepang telah terdapat kantor-kantor perwakilan PLO sebagai perlambang bahwa di negara-negara itu pemerintah-pemerintah telah menyadari bahwa penyelesaian krisis Arab-Israel akan dicapai bila masalah Palestina dapat diatasi.

Krisis Arab-Israel sebagai krisis utama bagi Dunia Arab dibarengi dengan krisis-krisis lain, seperti perang Irak-Iran, pergolakan di Libanon dan konfrontasi Yordania-Suriah.

Tetapi tidak boleh dilupakan peranan kedua superpower. Timbul pertanyaan bagaimana peranan Soviet di Afganistan, adakah tekad untuk terus menyerbu kawasan Teluk, dan bagaimana peranan Amerika Serikat yang berusaha menghimpun konsensus strategis untuk menghadapi ancaman Soviet. Baru Israel menerima rencana Amerika itu, sedangkan negara-negara Teluk Arab Saudi, Kuwait dan Bahrain tidak mau terseret dalam konfrontasi militer superpower. Mereka minta kepada kedua superpower agar tidak menggunakan kawasan Teluk sebagai medan pertarungan.

Demikianlah menurut ulasan ini timbul gambaran bahwa kawasan Timur Tengah akan tetap terlibat dalam krisis yang tidak ada habis-habisnya, walaupun memang ada usaha perdamaian Arab, karena di antara negara-negara Arab terdapat terlalu banyak perpecahan.